

Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Balongga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi: Studi pada BPBD

Hendra Wijaya ^{1*}; Irwan Waris ²; Harianto A. Lamading ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, hndrawjya81@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, irwanwaris@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, harianto@gmail.com

*Correspondence : hndrawjya81@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Manajemen, penanggulangan banjir, Kendala, Desa Balongga, BPBD*

Received. : Oktober 2025

Revised. : September 2025

Accepted : September 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan manajemen penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga, Kabupaten Sigi, dengan fokus pada peran BPBD dalam seluruh tahapan penanganan bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas upaya BPBD, tantangan yang dihadapi, serta keterlibatan masyarakat dan instansi terkait dalam proses tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali. Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana dari Nick Carter, yang meliputi tiga aspek utama: tanggapan (response), pemulihan (recovery), dan pembangunan (development). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empat informan utama, yaitu BPBD Kabupaten Sigi, aparat Desa Balongga, serta masyarakat Desa Balongga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sigi sudah berjalan cukup optimal dalam memberikan bantuan dan evakuasi korban saat banjir melalui kerja sama dengan berbagai instansi pada banjir di Desa Balongga. Namun, proses pemulihan dan pembangunan kembali masih lambat karena terbatasnya anggaran, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, upaya mitigasi jangka panjang seperti edukasi dan pembangunan infrastruktur tahan banjir juga masih kurang. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan referensi oleh pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian terkait Manajemen Penanggulangan Bencana.

ABSTRACT

The suboptimal flood disaster management in Balongga Village has become a factor inhibiting the activities of the Balongga Village community. This can be seen from the impact of the disaster that is still visible in the Balongga Village environment. The purpose of this study is to examine and understand the implementation of flood disaster management by the Sigi BPBD, and to identify the factors that support and inhibit it. This study uses Nick Carter's disaster management theory, which includes three main aspects: response, recovery, and development. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data collection is carried out through in-depth interviews with four

main informants, namely the Head of Division II of the BPBD, Balongga Village officials, and the Balongga Village community. This study shows that flood management by the Sigi BPBD in Balongga Village is still not optimal, especially in the recovery and development stages. Infrastructure repair and community economic recovery are slow due to limited funds and lack of community involvement. Flood prevention and environmental education efforts are also still very lacking. This research is expected to be used as a reference by parties who wish to conduct research related to Disaster Management.

Pendahuluan

Penanggulangan bencana banjir menuntut langkah-langkah yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, agar dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan (Lalu Budiman, 2023). Upaya ini tidak hanya berfokus pada saat air mulai naik, tetapi juga pada persiapan sebelum banjir dan pemulihan setelahnya, seperti membangun tanggul, mengatur penggunaan lahan, serta mengajak warga aktif berpartisipasi (Danil, 2021). Dengan cara ini, penanganan banjir bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga kehidupan sehari-hari masyarakat dapat kembali normal dengan lebih cepat (Heryati, 2020).

Dilihat dari kejadian yang pernah terjadi, Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah yang rawan akan bencana terutama banjir. Daerah-daerah yang berada di wilayah kabupaten Sigi tercatat hampir tiap tahunnya dilanda bencana banjir. Banjir yang sering terjadi di Kabupaten Sigi terjadi diakibatkan curah hujan yang tinggi dan masyarakat kabupaten Sigi yang mayoritas tempat tinggalnya di dataran tinggi (Solih Alfiandy, 2019).

Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana banjir, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang didalamnya mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Putri et al., 2021). Kemudian disusul Kabupaten Sigi yang menerbitkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang penanggulangan bencana (Perda Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah). Peraturan Daerah inilah yang seharusnya menjadi landasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi untuk melakukan Penanggulangan bencana.

Manajemen bencana banjir yang dilakukan BPBD di Desa Balongga masih menjadi perhatian serius. Meskipun upaya pra-bencana seperti simulasi evakuasi telah berhasil dilakukan oleh BPBD melalui kerja sama dengan lembaga terkait, dan kegiatan pasca-bencana berupa pembersihan dan pemulihan telah dilaksanakan oleh BPBD memiliki tantangan signifikan, terutama terkait pemulihan dan pembangunan infrastruktur mitigasi yang belum terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan dampak bencana, khususnya dalam aspek pemulihan dan

pembangunan kembali, memerlukan koordinasi yang lebih efektif antara BPBD, lembaga terkait untuk meminimalisir kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap bencana banjir di masa mendatang (Nabilah & Rosidin, 2024).

Tentu saja Kondisi ini menyoroti perlunya peningkatan koordinasi, perencanaan yang lebih komprehensif, dan implementasi yang lebih tanggap dalam siklus manajemen bencana, mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca bencana, demi memastikan Desa Balongga lebih tangguh menghadapi ancaman banjir di masa mendatang (Sabri Syahrir et al., 2024).

Endah Mustika Ramdani (2021) juga menyebutkan bahwa kompleksnya masalah penanganan banjir membutuhkan koordinasi yang terpadu dari berbagai instansi pemerintah. Oleh karena itu, jika koordinasi antarinstitusi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, dapat terjalin dengan efektif dan efisien, maka sebuah manajemen bencana dapat dilakukan dengan lancar, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh banjir dapat diminimalisir dan proses pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Anisa Utami (2024) menekankan bahwa manajemen penanggulangan bencana banjir penting dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan mencegah dampak bencana yang lebih besar

Pokok bahasan penelitian ini adalah manajemen penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Sigi di Desa Balongga. Menggunakan teori Nick Carter (1992) tentang siklus manajemen bencana, dimulai dari Tanggapan yang Merujuk pada tindakan segera yang dilakukan selama atau setelah bencana untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi dampak, dan memenuhi kebutuhan dasar, Pemulihan yang meliputi upaya untuk mengembalikan kondisi normal atau lebih baik, dan Pembangunan yang Berfokus pada upaya jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di masa depan, membangun ketahanan, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas manajemen bencana dengan fokus yang berbeda-beda. Misalnya penelitian yang dilakukan Radani (2024) yang menunjukkan bahwa Manajemen penanggulangan bencana banjir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik, Namun, penelitian terdahulu diatas belum secara khusus membahas manajemen penanggulangan bencana banjir, terutama dalam konteks penanganan pasca-bencana dan upaya mitigasi jangka panjang.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir mengisi celah dengan fokus pada efektivitas peran BPBD dalam siklus manajemen bencana banjir di Desa Balongga, dari aspek tanggapan, pemulihan, hingga pembangunan.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis pada bidang ilmu pemerintahan dan politik, khususnya perihal manajemen penanggulangan bencana banjir. Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memperkaya ilmu, khususnya tentang peran BPBD dalam siklus manajemen bencana. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi BPBD Kabupaten Sigi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga dan wilayah lain yang serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi serta memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi studi selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang manajemen bencana banjir. Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana praktik manajemen penanggulangan bencana banjir oleh BPBD di Desa Balongga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi.

Metode

Dalam penelitian ini digunakan dasar penelitian Kualitatif dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data dan penjelasan secara faktual mengenai Manajemen Bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana alam banjir di desa Balongga kabupaten sigi (Nozomi, 2023). Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena masyarakat yang bersifat kompleks, di antaranya proses, perilaku, dan pengalaman subjek dalam konteks yang alami (Nasution, 2023). Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menjawab masalah penelitian yang dikembangkan (Nina Adlini et al., 2022).

Teknik pengumpulan data berupa penelusuran pustaka yang dilakukan sebelum turun meneliti dengan cara menelusuri referensi terkait dengan manajemen penanggulangan bencana, undang-undang, maupun penelitian terdahulu, penelitian di lapangan dengan mengali data dengan cara, observasi proses memperoleh informasi melalui pengamatan secara langsung terhadap objek diteliti (Ahmad & Muslimah, 2021). Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara dengan Empat informan yang di ambil secara purposive yang dianggap memahami masalah atau objek yang akan diteliti yakni Pihak BPBDBPBD Kabupaten Sigi, Aparat Desa Balongga, Masyarakat Desa Balongga dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran utuh dari sudut pandang objek melalui media dokumen (Kristina, 2024).

Instrument utama dalam penelitian ini, adalah peneliti sendiri. Kegiatan yang di lakukan peneliti adalah melakukan pencatatan lapangan, merekam mengidentifikasi, dalam mengumpulkan data penelitian (Helen Sabera Adib, 2017). Proses analisis data dilakukan melalui menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil

1. Response (Tanggapan) BPBD Dalam Banjir yang terjadi di Desa Balongga

Tahap response merupakan fase krusial dalam manajemen bencana, di mana BPBD Kabupaten Sigi bersama perangkat desa dan relawan lokal berupaya memberikan penanganan awal terhadap dampak banjir di Desa Balongga. Temuan

utama pada tahap ini menunjukkan bahwa BPBD telah melakukan upaya maksimal dalam mengevakuasi warga terdampak, mendistribusikan bantuan logistik, serta melakukan koordinasi lintas instansi seperti TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPBD dan perangkat desa, diketahui bahwa proses evakuasi korban banjir dilakukan secara cepat, terutama pada wilayah yang paling terdampak di Dusun II dan III. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam waktu 24 jam setelah banjir, BPBD telah mengaktifkan posko darurat, menyediakan tenda pengungsian, serta mendistribusikan makanan siap saji, air bersih, dan perlengkapan kesehatan. Temuan sekunder dari laporan BPBD tahun 2024 juga mengonfirmasi bahwa Desa Balongga termasuk dalam prioritas penanganan bencana karena letaknya yang rawan dan sering terdampak banjir tahunan.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat isu tak terduga yang menjadi tantangan utama, yaitu kondisi cuaca ekstrem dan buruknya infrastruktur jalan menuju lokasi bencana. Hujan deras yang terus menerus menyebabkan akses jalan utama menuju Desa Balongga terputus, sehingga proses distribusi bantuan dan evakuasi korban menjadi terhambat. Beberapa relawan bahkan harus menggunakan perahu karet dan berjalan kaki menembus lumpur untuk mencapai lokasi pengungsian. Kondisi ini diperparah dengan minimnya alat berat dan kendaraan operasional yang dimiliki BPBD, sehingga proses pembersihan puing dan lumpur pasca banjir berjalan lambat. Temuan tambahan yang cukup menarik adalah adanya inisiatif swadaya masyarakat setempat, terutama pemuda desa, yang secara spontan membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan sebelum tim BPBD tiba. Hal ini menunjukkan adanya modal sosial yang kuat di masyarakat Balongga, meskipun belum terintegrasi secara formal dalam sistem penanggulangan bencana. Namun, partisipasi masyarakat non-lokal masih rendah, terutama dari warga transmigran yang kurang memiliki ikatan sosial dengan komunitas asli desa.

Gambar 1. Banjir Di Desa Balongga



Sumber: (Antara, 2024)

Selain itu, terdapat isu koordinasi yang belum optimal antara BPBD, pemerintah desa, dan lembaga lain seperti PUPR dan Dinas Sosial. Dalam beberapa kasus, terjadi

tumpang tindih penyaluran bantuan, sehingga beberapa keluarga menerima bantuan dengan cepat sementara yang lain belum mendapatkan sama sekali. Hal ini menyoroti perlunya sistem informasi terpadu dalam manajemen penanggulangan bencana di tingkat desa.

2. Recovery (Pemulihan) BPBD Dalam Banjir yang terjadi di Desa Balongga

Dalam proses manajemen penanggulangan bencana, fase pemulihan (recovery) memegang peranan penting untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan ke keadaan semula atau bahkan lebih baik setelah terjadinya bencana. Berdasarkan hasil dari penelitian tentang mengenai penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga, ditemukan bahwa pelaksanaan tahap pemulihan di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan.

Pada tahap pemulihan, hasil wawancara dengan informan utama, termasuk pihak BPBD dan perangkat desa, menunjukkan bahwa proses perbaikan infrastruktur pasca-banjir serta pemulihan ekonomi masyarakat berjalan cukup lambat. Informan dari BPBD Kabupaten Sigi menegaskan bahwa salah satu kendala utama dalam tahap ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Keterbatasan dana menyebabkan perbaikan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan saluran air, tidak dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Selain itu, bantuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, seperti modal usaha dan bantuan pertanian, juga sangat terbatas dan tidak menjangkau seluruh warga terdampak.

Gambar 2. Dampak dari banjir di desa Balongga



Sumber: Peneliti

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa pemulihan berjalan lambat bukan hanya karena faktor anggaran, tetapi juga karena kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat sendiri.

Banyak warga yang masih mengandalkan bantuan pemerintah tanpa melakukan upaya mandiri untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan perekonomian mereka. Pihak BPBD menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah agar proses pemulihan bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya kerja sama lintas sektor, seperti dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sudah mulai dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.

Terakhir, melalui wawancara bersama pihak BPBD, Pihak BPBD menekankan perlunya edukasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan dan peran aktif dalam proses pemulihan pasca-bencana. Tanpa adanya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, program-program pemulihan yang dirancang pemerintah akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi penting dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas masyarakat, baik melalui sosialisasi, pelatihan, maupun pembentukan kelompok-kelompok siaga bencana di tingkat desa. Dengan demikian, proses pemulihan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga didukung oleh inisiatif dan gotong royong masyarakat setempat

Secara keseluruhan, upaya pemulihan pasca-banjir di Desa Balongga oleh BPBD Kabupaten Sigi telah berjalan meskipun masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kerja sama lintas instansi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi hambatan dalam proses pemulihan, namun efektivitasnya masih perlu terus ditingkatkan. Ke depan, peningkatan kapasitas BPBD, pelibatan aktif masyarakat, serta investasi pada infrastruktur tahan banjir dan edukasi kebencanaan sangat diperlukan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal dan masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana serupa di masa mendatang.

3. Pembangunan (Development) Pasca bencana banjir di Desa Balongga

Sebagai bagian dari upaya memahami efektivitas manajemen penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga, penelitian ini juga menyoroti tahap pembangunan (development) pasca-bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sigi. Tahap pembangunan merupakan fase penting dalam siklus manajemen bencana karena berfokus pada upaya jangka panjang untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD dan perangkat desa, diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan kembali di Desa Balongga masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan pembangunan infrastruktur tahan banjir, seperti perbaikan tanggul, normalisasi sungai, dan pembuatan saluran drainase, belum dapat direalisasikan secara optimal. Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa program edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih sangat terbatas. Rendahnya tingkat sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat menyebabkan

kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana belum tumbuh secara merata. Hal ini berdampak pada minimnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya banjir ulang.

Dari sisi masyarakat, melalui wawancara bersama Masyarakat Balongga mengeluhkan lambatnya realisasi bantuan pembangunan rumah dan fasilitas umum pasca-banjir. Banyak warga yang masih tinggal di hunian sementara karena proses pembangunan rumah permanen belum selesai. Selain itu, beberapa fasilitas umum seperti sekolah membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki, sehingga mengganggu aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Warga berharap pemerintah dapat mempercepat proses pembangunan dan lebih transparan dalam penyaluran bantuan

Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi lintas sektor dan kerja sama antara BPBD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya masih perlu ditingkatkan agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Informan menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur tahan banjir serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap pembangunan dalam manajemen penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga masih memerlukan perhatian lebih, baik dari segi pendanaan, sinergi antarinstansi, maupun pelibatan aktif masyarakat. Diharapkan, dengan adanya perbaikan di berbagai aspek tersebut, upaya penanggulangan bencana di masa depan dapat berjalan lebih optimal dan masyarakat Balongga menjadi lebih tangguh menghadapi ancaman banjir.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa fase pembangunan dalam manajemen bencana di Desa Balongga masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi anggaran, koordinasi, maupun partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas BPBD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pasca-bencana, pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan, serta investasi pada infrastruktur yang tahan terhadap bencana. Dengan demikian, diharapkan upaya penanggulangan bencana di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan dampak bencana dapat diminimalkan secara signifikan.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, hasil temuan menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sigi memegang peran strategis dalam manajemen penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga. BPBD tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam penanganan darurat dan pemulihan pasca-bencana, tetapi juga berperan penting dalam membangun koordinasi lintas instansi serta meningkatkan kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa BPBD telah diakui secara luas oleh masyarakat dan berbagai pihak sebagai garda terdepan dalam upaya penanggulangan bencana, namun masih menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya, anggaran, serta partisipasi aktif

masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan BPBD tetap menjadi elemen vital dalam setiap tahapan manajemen bencana, mulai dari respons cepat, pemulihan, hingga pembangunan kembali, sehingga keberlanjutan dan efektivitas penanggulangan bencana di Desa Balongga sangat bergantung pada penguatan kapasitas dan legitimasi formal BPBD di tingkat lokal.

Perbandingan antara penelitian mengenai manajemen penanggulangan bencana banjir pada BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan penelitian Hendra Wijaya di BPBD Kabupaten Sigi menunjukkan adanya pola dan tantangan yang serupa dalam pelaksanaan manajemen bencana di tingkat daerah. Kedua penelitian sama-sama menyoroti bahwa BPBD di masing-masing kabupaten telah berupaya menerapkan tahapan manajemen bencana sesuai teori Nick Carter, mulai dari respons cepat saat tanggap darurat, pemulihan, hingga pembangunan kembali. Namun, baik di Hulu Sungai Utara maupun di Sigi, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, serta hambatan koordinasi lintas sektor. Meski BPBD di kedua daerah diakui secara formal sebagai lembaga utama penanggulangan bencana, efektivitas mereka dalam mitigasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur tahan banjir dan edukasi masyarakat, masih belum optimal. Perbedaan yang menonjol terletak pada konteks geografis dan sosial: BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih sering menghadapi tantangan terkait karakteristik sungai dan pola pemukiman, sedangkan di Kabupaten Sigi, hambatan cuaca ekstrem dan kondisi jalan yang buruk menjadi faktor penghambat utama. Dengan demikian, kedua penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas BPBD, peningkatan kolaborasi antarinstansi, dan melibatkan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan manajemen bencana agar penanggulangan bencana banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Berdasarkan teori Nick Carter, manajemen bencana terdiri dari tiga tahap utama: tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali. Penelitian ini di Desa Balongga menemukan bahwa BPBD telah menjalankan respons cepat dan koordinasi yang baik pada tahap tanggap darurat, namun masih menghadapi kendala pada tahap pemulihan dan pembangunan akibat keterbatasan anggaran dan partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anisa Utami (2024) di kawasan Pantai Minang Rua, yang juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam seluruh siklus manajemen bencana agar ketahanan komunitas dapat terwujud secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil perbandingan kedua penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPBD menghadapi tantangan serupa dalam manajemen penanggulangan bencana banjir, terutama terkait keterbatasan anggaran, koordinasi lintas instansi, dan partisipasi masyarakat. Namun, BPBD Kabupaten Sigi memiliki keunggulan dalam hal respon cepat dan koordinasi saat tanggap darurat, meskipun masih perlu peningkatan pada tahap pemulihan dan pembangunan kembali. Dengan adanya penguatan kapasitas, regulasi yang lebih jelas, serta melibatkan masyarakat yang lebih aktif, kedua BPBD ini berpotensi menjadi lembaga yang lebih efektif dan integral

dalam sistem penanggulangan bencana di daerahnya, sehingga mampu mewujudkan manajemen bencana yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari segi pembangunan, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembangunan kembali pasca-banjir di Desa Balongga masih belum optimal. BPBD dan pemerintah daerah menghadapi kendala utama berupa keterbatasan anggaran dan minimnya infrastruktur tahan banjir yang dibangun. Selain itu, edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga masih kurang, sehingga upaya mitigasi jangka panjang belum berjalan maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas BPBD, investasi pada infrastruktur yang lebih tahan bencana, serta keterlibatan aktif masyarakat agar pembangunan pasca-bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen penanggulangan bencana banjir di Desa Balongga oleh BPBD Kabupaten Sigi telah berjalan dengan cukup baik, khususnya pada tahap tanggap darurat di mana BPBD mampu melakukan koordinasi lintas instansi untuk penyaluran bantuan dan evakuasi korban. Namun, penelitian juga menemukan adanya tantangan pada tahap pemulihan dan pembangunan kembali, seperti keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya upaya mitigasi jangka panjang. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang menolak pelaksanaan simulasi bencana karena menganggapnya dapat mengundang bencana, sehingga menghambat upaya edukasi dan peningkatan kesiapsiagaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas BPBD, penguatan kerja sama antar OPD, serta pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat agar manajemen bencana di Desa Balongga dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD telah berupaya maksimal dalam memberikan bantuan logistik dan evakuasi korban melalui koordinasi lintas instansi, meskipun masih terdapat kendala seperti cuaca ekstrem, keterbatasan anggaran, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas BPBD, pelibatan aktif masyarakat, serta investasi pada infrastruktur tahan bencana sebagai langkah strategis dalam upaya perlindungan dan pengawasan masyarakat dari bahaya bencana banjir.

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi dalam melindungi dan mengawasi masyarakat dari dampak bencana banjir. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi BPBD selama pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap tanggap darurat, pemulihan, maupun pembangunan kembali.

Hasil Penelitian ini menunjukkan BPBD Kabupaten Sigi telah melakukan upaya responsif melalui pemberian bantuan logistik dan evakuasi korban banjir secara terkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. Di sisi lain, langkah-langkah

pemulihan seperti perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat juga telah diupayakan, meskipun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan dana dan minimnya partisipasi masyarakat. Namun, pelaksanaan upaya pembangunan jangka panjang, termasuk edukasi dan mitigasi risiko banjir, masih belum optimal sehingga ancaman banjir tetap menjadi tantangan utama di wilayah tersebut. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana masih rendah, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan agar masyarakat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi risiko bencana banjir.

kontribusi utama penelitian ini terletak pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat dalam mengatasi dampak bencana banjir secara efektif. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk perlindungan masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana banjir.

Ucapan Terima Kasih

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua pembimbing, Bapak Irwan Waris, M.Si dan Bapak Harianto A. Lamading, S.Ip, M.Si, atas segala arahan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menghaturkan apresiasi kepada seluruh informan di Desa Balongga, khususnya pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, serta masyarakat setempat yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tak lupa, rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada keluarga tercinta dan sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan moral di setiap tahapan penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen penanggulangan bencana, dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Referensi

- Ahmad, & Muslimah. (2021). *Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif* (Vol. 1).
- Anisa Utami, Khairunnisa Simbolon, Imam Mahmud, & Maulana Mukhlis. (2024). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Manajemen Penanggulangan bencana Banjir Pasang Dan Tsunami Di Kawasan Pantai Minang Rua. *RAGOM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
- Antara. (2024, April 3). *BPBD Lakukan Pendataan Di Lokasi Banjir Bandang Di Desa*

Balongga Sigi.

- Danil, M. (2021). Manajemen Bencana.
- Helen Sabera Adib. (2017). Teknik Pengembangan Instrumen Penelitian Ilmiah Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Teknik Pengembangan Instrumen Penelitian Ilmiah Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 139–146. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Kristina, A. (2024). Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif. Deepublish.
- Lalu Budiman, O., Mulkan, L., & Akbar, T. (2023). Pengendalian Bencana Alam Banjir Di Kabupaten Sumbawa BaraT. In *Jurnal Ilmiah Hospitality 421 P-ISSN* (Vol. 12, Issue 1). <http://stp-mataram.e-journal.id/JHI>
- Nabilah, A., & Rosidin, A. (2024). Sosialisasi Undang-Undang Tentang Manajemen Penanggulangan Bencana Di Kota Serang. *WINDRADI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 48–56. <https://doi.org/10.61332/windradi.v2i2.233>
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (1). *Revista Brasileira De Linguística Aplicada*, 5.
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka (Vol. 6, Issue 1).
- Nozomi, I. (2023). Penerapan Data Mining Untuk Peringatan Dini Banjir Menggunakan Metode Klastering K-Means (Studi Kasus Kota Padang). In *Jurnal Sains Informatika Terapan (Jsit) E-ISSN* (Vol. 2, Issue 2). Bulan Juni.
- Perda Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah. (N.D.).
- Putri, S. S., Purnamsari, H., & Azizah, A. N. (2021). Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Bekasi.
- Radani, Arpandi, & Saidah Hasbiyah. (2024). Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Amuntai Selatan Dan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara). *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3).
- Sabri Syahrir, M., Syam, S., Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, D., & Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, D. (2024). Penyuluhan Manajemen Bencana Gempa Bumi Pada Guru Sekolah Dasar Inpres Binangga Kabupaten Sigi. <https://doi.org/10.22487/dedikatifkesmas.v5i1.1489>
- Solih Alfiandy. (2019). Analisis Penyebab Hujan Lebat Terkait Banjir Bandang Dan Longsor Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tanggal 28 April 2019. *Prakirawan Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri*.